

## **BAB VI PEMBAHASAN**

### **6.1 Keterbatasan Penelitian**

Pada penelitian ini adanya keterbatasan yang ditemukan oleh peneliti selama proses penelitian berlangsung, yaitu adanya jawaban yang diberikan oleh informan cenderung subjektif yang mana hanya memberikan jawaban seadanya sehingga diperkuat melalui observasi, selanjutnya terdapat keterbatasan peneliti untuk memperoleh data yang dibutuhkan, disebabkan karena memang pihak Puskesmas tidak menyediakan data-data yang dibutuhkan seperti tidak adanya form pengawasan, materi penyuluhan, dan jadwal agenda rapat lokakarya mini yang dibutuhkan.

### **6.2 Pembahasan**

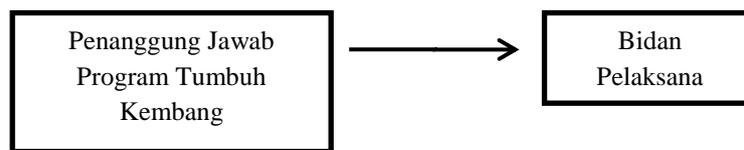
#### **6.2.1 Jenis Koordinasi**

Suatu instansi atau organisasi sangat membutuhkan adanya koordinasi agar dapat menentukan dan mengelola semua kegiatan atau program yang dijalankan agar tidak terjadinya tumpang tindih tugas satu dengan yang lain. Hal ini di dukung pendapat dari Thompson dalam Burton dan Spender (2012) menjelaskan bahwa koordinasi ialah tali pengikat dalam suatu organisasi yang menghubungkan setiap individu dalam organisasi tersebut dengan alur ketergantungan yang jelas yang di pahami oleh setiap individu yang menjadi suatu kebiasaan dalam melaksanakan kegiatan organisasi guna menjamin pergerakan individu organisasi ke arah tujuan bersama sesuai tanggungjawab masing-masing.

Tujuan dengan adanya alur pelaksanaan yang jelas agar dapat dipahami oleh setiap pihak-pihak yang terlibat dalam pelaksanaan pemantauan pertumbuhan dan perkembangan balita ini dapat memberikan kejelasan bagaimana pelaksanaan kegiatan tersebut dapat dimulai dan berhenti dimana sesuai dengan alur yang ditentukan, hal ini menjelaskan mengenai tingkat ketergantungan pada pelaksanaan pemantauan pertumbuhan dan perkembangan balita dimulai dari koordinasi antara penanggung jawab program dengan bidan pelaksana dan koordinasi antara bidan pelaksana dengan kader pada persiapan kegiatan posyandu

### A. Jenis Koordinasi antara Penanggung jawab Program Tumbuh Kembang dengan Bidan Pelaksana

Berdasarkan hasil wawancara mendalam dengan petugas yang terlibat dalam pelaksanaan pemantauan pertumbuhan dan perkembangan balita ini menyebutkan bahwa alur antara penanggung jawab tumbuh kembang anak dan bidan sebagai berikut :



**Gambar 6.1**

Alur koordinasi antara penanggung jawab program tumbuh kembang dengan bidan pelaksana dalam pelaksanaan pemantauan pertumbuhan dan perkembangan balita di wilayah kerja Puskesmas Baloi Permai.

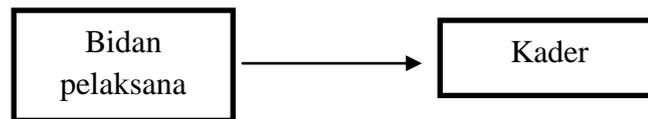
Apabila dilihat dari alur kegiatan yang ada dalam pelaksanaan pemantauan pertumbuhan dan perkembangan balita di wilayah kerja Puskesmas Baloi Permai, sehingga kita mengetahui jenis koordinasi berdasarkan tingkat ketergantungan antara penanggung jawab program dengan bidan pelaksana merupakan jenis koordinasi *Pooled interdependence*. Dimana jenis koordinasi *Pooled interdependence* merupakan jenis koordinasi yang memiliki ketergantungan terpusat antar petugas karena koordinasi yang terjadi ketika pekerjaan tersebut dilakukan dalam waktu bersamaan dan menghasilkan output yang dikumpulkan secara bersamaan pula sesuai dengan apa yang telah ditentukan.

Untuk lebih jelas mengenai tahapan alur koordinasi yang didapatkan dari penelitian ini yakni dapat dilihat dari uraian singkat dibawah ini mengapa dalam pelaksanaan pemantauan pertumbuhan dan perkembangan balita antara penanggung jawab program dengan bidan pelaksana merupakan jenis koordinasi *Pooled interdependence*, yaitu : adanya hubungan ketergantungan antara penanggung jawab program tumbuh kembang dengan bidan pelaksana dalam menjalankan tugasnya dimana penanggung jawab memberikan intruksi mengenai tugas pokok dan fungsi bidan pelaksana dalam melaksanakan tugasnya pada kegiatan pemantauan pertumbuhan dan perkembangan balita. Sehingga jenis

koordinasi yang terpusat (*pooled interdependence*) dari penanggung jawab program tumbuh kembang dengan bidan pelaksana sudah terlaksana sebagaimana mestinya untuk mendukung koordinasi yang baik.

### B. Jenis Koordinasi antara Bidan Pelaksana dengan Kader

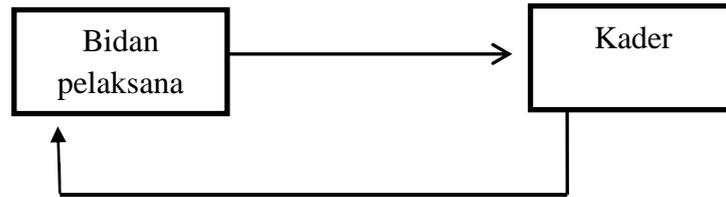
Berdasarkan hasil wawancara mendalam dengan petugas yang terlibat dalam pelaksanaan pemantauan pertumbuhan dan perkembangan balita ini menyebutkan bahwa alur antara bidan pelaksana dengan kader sebagai berikut :



**Gambar 6.2**

Alur koordinasi antara bidan pelaksana dengan kader dalam pelaksanaan pemantauan pertumbuhan dan perkembangan balita di wilayah kerja Puskesmas Baloi Permai.

Berdasarkan hasil penelitian jenis koordinasi berdasarkan tingkat ketergantungan antara bidan pelaksana dengan kader ialah *pooled interdependence*. Akan tetapi jenis koordinasi tersebut belum optimal karena hanya terpusat oleh bidan pelaksana, padahal adanya hubungan timbal balik antar kader dengan bidan pelaksana sangat diperlukan guna mendukung pelaksanaan pemantauan pertumbuhan dan perkembangan balita yang baik, hal ini didukung oleh pendapat dari Thompson dalam Burton dan Spender (2012) menyatakan bahwa suatu pekerjaan atau organisasi jika ingin berjalan dengan baik dan optimal harus menggunakan jenis koordinasi yang memiliki pengaruh yang baik antar setiap petugas agar dapat menghasilkan output yang lebih optimal yakni *Reciprocal interdependence* dimana jenis koordinasi ini merupakan adanya interaksi yang saling berhubungan satu sama lain dalam memberikan *feedback* mengenai pekerjaan yang telah dihasilkan serta saling berurutan melewati tahap-tahapan yang telah di tentukan. Maka untuk mengoptimalkan kegiatan pelaksanaan pemantauan pertumbuhan dan perkembangan balita, jenis koordinasi berdasarkan tingkat ketergantungan antara bidan pelaksana dengan kader seharusnya ialah *Reciprocal Interdependence*.



**Gambar 6.3**

Alur koordinasi antara bidan pelaksana dengan kader dalam pelaksanaan pemantauan pertumbuhan dan perkembangan balita di wilayah kerja Puskesmas Baloi Permai

Guna mendukung agar jenis koordinasi yang digunakan oleh wilayah kerja Puskesmas Baloi Permai berjalan dengan optimal dalam pelaksanaan pemantauan pertumbuhan dan perkembangan balita, maka ada beberapa prinsip koordinasi yang dapat mempengaruhi pelaksanaan kegiatan dan memudahkan menerapkan jenis koordinasi *Reciprocal interdependence* antara bidan pelaksana dengan kader dalam pelaksanaan pemantauan pertumbuhan dan perkembangan balita yang bertujuan agar dapat mengurangi penyimpangan atau kesalahan dalam pelaksanaan kegiatan yaitu adanya komunikasi yang efektif antara bidan pelaksana dengan kader, bidan pelaksana tidak hanya berkoordinasi dengan kader apabila terdapat kasus penyimpangan dalam pertumbuhan dan perkembangan balita, akan tetapi kader juga harus berperan aktif dalam berkoordinasi dengan bidan pelaksana apabila ada balita yang mengalami penyimpangan tumbuh kembang.

Dampak yang ditimbulkan apabila koordinasi yang terjadi antara bidan pelaksana dengan kader berupa jenis koordinasi *Pooled interdependence* berdasarkan fakta dilapangan ialah tidak ada hubungan timbal balik antara bidan pelaksana dengan kader pada pelaksanaan pemantauan pertumbuhan dan perkembangan balita apabila terdapat penyimpangan mengenai tumbuh kembang balita, koordinasi hanya terpusat dari bidan pelaksana, dimana peran kader pasif untuk mengkoordinasikan penyimpangan balita maka hal tersebut yang dapat menyebabkan cakupan pemantauan pertumbuhan dan perkembangan balita di wilayah kerja Puskesmas Baloi Permai tersebut rendah dan jauh dari target yang telah ditetapkan, sebab kader ialah pihak yang paling dekat dengan masyarakat. Hasil penelitian diatas sejalan dengan penelitian Muninjaya (2011), yang mengatakan bahwa koordinasi pelaksanaan posbindu lansia yang baik dapat

memberikan pelayanan sesuai dengan harapan. Koordinasi kader sangat dibutuhkan untuk meningkatkan kepuasan lansia meliputi koordinasi pada perencanaan dalam menyusun perencanaan yang dibutuhkan seperti jumlah penduduk dan Kepala Keluarga (KK) di wilayah cakupan, kondisi sosial ekonomi penduduk, jumlah lanjut usia keseluruhan, kondisi kesehatan lansia, jumlah lansia yang mandiri, cacat, terlantar, lansia produktif dan lansia yang mengalami tindakan penelantaran, pelecehan, pengucilan dan kekerasan.

Dengan demikian koordinasi dalam pelaksanaan pemantauan pertumbuhan dan perkembangan balita antara bidan pelaksana dengan kader selalu berjalan dengan rutin dan memperoleh output yang diharapkan maka, pihak yang terletak di level bawah yakni ialah kader harus lebih aktif dalam melaporkan apabila terdapat penyimpangan terhadap pertumbuhan dan perkembangan balita di wilayah kerja Puskesmas Baloi Permai, tidak hanya megandalkan peran bidan pelaksana dalam pelaksanaan pemantuan pertumbuhan dan perkembangan balita di wilayah kerja Puskesmas Baloi Permai. Hal ini didukung berdasarkan hasil penelitian Fitri (2012) bahwa pelaksanaan koordinasi dalam pencatatan dan pelaporan kesehatan ibu dan anak sangat dibutuhkannya pemahaman yang baik dari setiap petugas mengenai pencatatan dan pelaporan KIA agar mampu meningkatkan efektifitas dan efisiensi bekerja, sehingga dibutuhkannya kelengkapan sarana, pembagian tugas dengan tanggung jawab setiap pegawai, pengawasan guna menghasilkan output pencatatan dan pelaporan yang tepat waktu, komunikasi yang baik serta adanya pelaksanaan supervisi.

### **6.2.2 Standarisasi**

Standarisasi dalam pelaksanaan pemantauan pertumbuhan dan perkembangan balita merupakan salah satu mekanisme koordinasi dalam pelaksanaan pemantuan pertumbuhan dan perkembangan balita yang dapat ditinjau dari standarisasi proses kerja (SOP), standarisasi hasil kerja, dan standarisasi keterampilan dan pengetahuan. Berdasarkan hasil wawancara mendalam dan observasi menggunakan lembar checklist diketahui bahwa wilayah kerja Puskesmas Baloi Permai tidak adanya SOP yang menjadi acuan atau pedoman pelaksanaan pemantauan pertumbuhan dan perkembangan balita, sedangkan untuk standarisasi hasil kerja berdasarkan dari hasil wawancara mendalam dengan informan bahwa tidak semua informan mengetahui standarisasi

hasil yang harus dicapai, dan untuk standarisasi keterampilan dan pengetahuan, dilihat dari aspek keterampilan, bahwa semua pihak yang terlibat memiliki tingkat keterampilan yang berbeda-beda tidak terstandarisasi.

Standarisasi sangat erat hubungannya dengan formalisasi yang ada dalam suatu organisasi. Formalisasi menurut Mintzberg dalam Fitri (2012) merupakan suatu keadaan dimana adanya aturan-aturan, prosedur, intruksi-intruksi dan komunikasi yang dibakukan, atau dengan kata lain sejauh mana pekerjaan atau tugas yang dikerjakan dalam organisasi tersebut telah distandarisasikan. Formalisasi sangat penting karena dengan adanya standarisasi akan dicapainya output pelaksanaan pemantauan pertumbuhan dan perkembangan balita yang sama dan konsisten sehingga dapat mengurangi kesalahan yang tidak perlu terjadi dalam kegiatan tersebut. Tidak hanya itu dengan adanya formalisasi dapat mempermudah koordinasi antar unit atau bagian program dalam mencapai tujuan atau target yang ingin di capai.

#### **A. Standarisasi Proses Kerja**

Standarisasi proses kerja menurut Sampara (2013) adalah suatu dokumen atau instrument yang memuat tentang proses dan prosedur suatu kegiatan yang bersifat efektif dan efisien berdasarkan suatu standar yang sudah baku. Sedangkan definisi SOP menurut Atmoko dalam Fitri (2012) yaitu suatu pedoman atau acuan yang digunakan untuk melaksanakan tugas yang sudah menjadi tanggungjawab setiap pekerja sesuai dengan fungsi dan alat penilaian kinerja instansi pemerintah berdasarkan indikator teknis, administratif, dan prosedur yang sesuai dengan tata kerja dan prosedur kerja. Masih berdasarkan pendapat Sampara (2013) bahwa standarisasi proses kerja ini bertujuan untuk menyusun standar langkah-langkah atau alur kerja secara efektif dan efisien dalam mengatur pembuatan semua keputusan dan tindakan di dalam organisasi, baik untuk aspek operasional maupun administratif. Oleh karena itu, SOP sangat penting dalam suatu organisasi, yang didukung oleh pendapat dari Suropto (2012) menyatakan pentingnya SOP sebagai mencapai efektifitas koordinasi dalam manajemen internal suatu organisasi untuk mendukung pencapaian tujuan yang ditetapkan. SOP merupakan panduan teknis yang berisi intruksi yang menggambarkan proses kegiatan atau penyelenggaraan tugas dan fungsi dalam organisasi. SOP berfungsi

untuk memudahkan dalam memahami dengan jelas, apa, mengapa, dan bagaimana langkah-langkah atau alur pekerjaan tersebut dilakukan serta persyaratan apa yang wajib dipenuhi dalam kegiatan tersebut.

Berdasarkan Permenpan Nomor PER/21/M-PAN/11/2008 manfaat dari ketersediaan standarisasi proses kerja (SOP) dalam suatu organisasi atau instansi pemerintah, yaitu sebagai standarisasi cara yang dilakukan pegawai dalam menyelesaikan pekerjaan tertentu, mengurangi kesalahan dan kelalaian, dapat membantu petugas atau staff menjadi lebih mandiri dan tidak tergantung pada intervensi manajemen, sehingga akan mengurangi keterlibatan pimpinan dalam pelaksanaan proses sehari-hari, dapat meningkatkan akuntabilitas dengan mendokumentasikan tanggung jawab khusus dalam melaksanakan tugas, dapat menciptakan ukuran standar kinerja yang akan memberikan pegawai. Berguna dalam memperbaiki kinerja serta membantu mengevaluasi usaha yang telah dilakukan, dapat menciptakan bahan-bahan training yang dapat membantu pegawai baru untuk cepat melakukan tugasnya, dapat menunjukkan kinerja bahwa organisasi efisien dan dikelola dengan baik, dapat menyediakan pedoman bagi setiap petugas atau staff di unit pelayanan dalam melaksanakan pemberian pelayanan sehari-hari, dapat menghindari tumpang tindih pelaksanaan tugas pemberian pelayanan, serta dapat membantu penelusuran terhadap kesalahan-kesalahan prosedural dalam memberikan pelayanan. Menjamin proses pelayanan tetap berjalan dalam berbagai situasi. Pelaksanaan pemantauan pertumbuhan dan perkembangan balita.

Terlihat berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan kegiatan pemantauan pertumbuhan dan perkembangan balita yang terjadi di wilayah kerja Puskesmas Baloi Permai belum terstandarisasi proses kerja (SOP) yang menjadi acuan dalam melaksanakan pemantauan pertumbuhan dan perkembangan balita melainkan hanya tersedia uraian tugas (*job description*). Karena setelah ditelaah bahwasanya SOP yang baik ialah memuat tentang proses dan prosedur suatu kegiatan yang bersifat efektif dan efisien berdasarkan suatu standar yang sudah baku sedangkan SOP yang tersedia di Puskesmas Baloi Permai mengenai Stimulasi, Deteksi dan Intervensi Dini hanya menguraikan tupoksi pelaksanaan pemantauan, tidak menguraikan bagaimana prosedur

mengukur tinggi badan, menimbang berat badan, mengukur lingkar kepala yang sesuai standar, dan tidak menjelaskan lebih detail bagaimana prosedur deteksi penyimpangan terhadap perkembangan dan mental emosional yang sesuai standar baku. Sehingga hal ini dapat berimplikasi terhadap kinerja petugas atau pihak yang berperan aktif dalam kegiatan tersebut. Tidak hanya itu saja dengan tidak adanya ketersediaan SOP dalam pelaksanaan pemantauan pertumbuhan dan perkembangan balita ini akan menyulitkan individu yang belum terbiasa dengan jenis pekerjaan baru atau petugas baru yang memiliki tanggungjawab terkait kegiatan pemantauan pertumbuhan dan perkembangan balita tidak adanya acuan dalam bagaimana proses kerja tersebut dilakukan guna mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Padahal SOP dalam suatu organisasi bersifat sangat penting, karena dengan adanya penyusunan SOP yang baik akan membantu organisasi untuk menghindari kegagalan atau kesalahan, keraguan, duplikasi serta pemborosan dalam proses pelaksanaan kegiatan, selain itu untuk menjelaskan alur tugas, wewenang dan tanggungjawab dari pimpinan atau petugas yang terkait sehingga dapat mengurangi tumpang tindih atau saling lempar tanggungjawab dalam pelaksanaan tugas serta dapat menjadi tolak ukur dalam proses evaluasi atas pelaksanaan tugas atau pekerjaan (Sampara, 2013). Adapun bentuk dokumen standarisasi proses kerja dapat berupa standar operasional prosedur, prosedur kerja, prosedur tetap, prosedur tindakan, prosedur penatalaksanaan, petunjuk pelaksanaan, dan petunjuk teknik (Fitri, 2012).

Sehingga dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan pemantauan pertumbuhan dan perkembangan balita tidak adanya standarisasi proses kerja (SOP) yang tersedia untuk menjadi pedoman dalam pelaksanaan pemantauan pertumbuhan dan perkembangan balita melainkan hanya ada uraian tugas (*job description*). Padahal standarisasi proses kerja sangat diperlukan dalam pelaksanaan pemantauan pertumbuhan dan perkembangan balita guna menyelaraskan prosedur yang sama agar output dari kegiatan tersebut dapat tercapai.

## **B. Standarisasi Hasil Kerja**

Tangkilisin (2005), menyebutkan bahwa standarisasi hasil yaitu ketika produk harus diproduksi sesuai spesifikasi, maka spesifikasi tersebut dapat digunakan sebagai landasan untuk melakukan koordinasi aktivitas. Standarisasi hasil kerja berfungsi sebagai tolak ukur dalam menentukan keberhasilan kinerja petugas dalam melaksanakan pekerjaannya. Standar kinerja merupakan target, sasaran, atau tujuan upaya kerja petugas dalam ukuran waktu tertentu sesuai dengan yang telah ditetapkan. Dalam melaksanakan tugas atau pekerjaannya, diharapkan petugas wajib mengarahkan tenaga, keterampilan, pengetahuan dan waktu untuk mencapai apa yang telah ditetapkan oleh standar kinerja atau standar target yang harus dicapai dalam suatu instansi (Fitri, 2012). Kaitannya dengan koordinasi pemantauan pertumbuhan dan perkembangan balita di wilayah kerja Puskesmas Baloi Permai adalah pada program pemantauan pertumbuhan dan perkembangan balita harus memiliki target yang harus dicapai, maka target tersebut digunakan sebagai landasan oleh pihak-pihak yang terlibat dalam pelaksanaan pemantauan tumbuh kembang dalam melakukan koordinasi. Penanggung jawab program, bidan pelaksana dan kader harus saling memiliki pemahaman yang sama mengenai target pelaksanaan pemantauan pertumbuhan dan perkembangan balita di wilayah kerja Puskesmas Baloi Permai yang akan dicapai.

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa standarisasi hasil kerja dari pelaksanaan pemantauan pertumbuhan dan perkembangan balita sudah memiliki standarisasi hasil kerja yang harus dicapai, yang ditinjau dari target capaian program, yaitu dengan target capaian program sebesar 90% di tingkat Puskesmas dan 100% ditinjau berdasarkan SPM tingkat kabupaten/kota Batam. Dengan adanya dua target utama dalam pencapaian program hal ini menyebabkan tidak optimalnya pelaksanaan pemantauan pertumbuhan dan perkembangann balita.

Menurut kajian teori mengenai goals setting atau penetapan target, bahwasanya terdapat 5 dimensi yang mempengaruhi dalam penetapan target, yakni *Specific*, *Measurable*, *Attainable*, *Realistic*, dan *Time*. Penetapan target

dalam pelaksanaan pemantauan pertumbuhan dan perkembangan balita di wilayah kerja Puskesmas Baloi Permai belum memenuhi syarat dimensi *goals setting*, karena masih terdapat dua target utama yang harus dicapai. Pentingnya penentuan target secara spesifik guna menghindari hasil yang tidak jelas, karena apabila target yang tidak jelas akan membuahkan hasil tidak jelas pula. Penetapan target dalam pelaksanaan pemantauan pertumbuhan dan perkembangan balita juga belum realistis karena pada prinsipnya penetapan target tidak boleh terlalu mudah dan tidak boleh terlalu sulit untuk dicapai, seperti halnya target yang diharuskan dicapai Puskesmas Baloi Permai berdasarkan SPM kabupaten/kota Batam yang menetapkan target pencapaian pemantauan pertumbuhan dan perkembangan balita harus 100% tanpa mempertimbangkan faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan program.

Mengingat bahwasanya wilayah kerja Puskesmas Baloi Permai merupakan Puskesmas kedua terbesar di Batam dengan cakupan balita terbanyak, sehingga dengan target sebesar 90% ditingkat Puskesmas dan 100% ditinjau dari SPM kab / kota Batam belum mencapai hasil yang maksimal. Terdapat faktor-faktor yang menyebabkan tidak tercapainya target secara maksimal, salah satunya ialah kurangnya sumber daya manusia dalam pelaksanaan kegiatan. Hal ini didukung oleh penelitian Saputra dan Widyowati (2017) menyatakan bahwa kualitas layanan, dilihat dari dimensi ini Badan Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Tengah telah mampu memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kewenangan yang dimiliki badan lingkungan hidup Provinsi Jawa Tengah. kendala yang masih belum bisa teratasi adalah masih kurangnya sumber daya manusia sebagai salah satu indikator yang menyebabkan capaian target suatu layanan.

Penelitian ini sejalan dengan penelitian Siriyei (2013) yang menunjukkan bahwa semakin tinggi beban kerja maka semakin rendah peluangnya untuk mampu mencapai cakupan indikator SPM. Untuk itu beban kerja merupakan aspek pokok yang menjadi dasar untuk menyusun sebuah program. Tingginya beban kerja sebenarnya dapat disiasati dengan meningkatkan kerjasama dalam tim. Penelitian ini membuktikan bahwa semakin baik kerjasama tim maka

semakin tinggi pula kemungkinan tim tersebut menapai target SPM yang sudah ditentukan.

Untuk menyamakan persepsi dan pemahaman dalam pengaktualisasi urusan wajib bidang kesehatan di Kabupaten / Kota seiring dengan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor 4 tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidan Kesehatan, maka dalam rangka memberikan panduan untuk melaksanakan pelayanan dasar di bidang kesehatan, penetapan target menjadi salah satu acuan dalam penyetaraan mutu pelayanan kesehatan. Pemenuhan pelayanan kesehatan terutama di level Puskesmas sesuai PERMENKES No 75 tahun 2014 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat. Puskesmas sebagai fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama akan menjadi unit terdepan dalam upaya pencapaian target-target SPM. Standarisasi hasil kerja dalam pelaksanaan pemantauan pertumbuhan dan perkembangan balita sudah sesuai dengan Permenkes RI nomor 4 tahun 2019 pasal 4 tentang capaian kinerja pemerintah Daerah dalam pemenuhan mutu pelayanan setiap jenis pelayanan dasar pada SPM Kesehatan harus 100%. Dimana dalam pelaksanaan pemantauan pertumbuhan dan perkembangan balita harus merujuk dan sesuai dengan target SPM yang telah ditentukan yakni sebesar 100%. Sehingga dapat disimpulkan bahwa standarisasi hasil kerja yang harus dicapai semua pihak yang terlibat dalam kegiatan ini sudah mengetahui hasil kerja yang harus dicapai akan tetapi dalam proses pelaksanaannya belum berjalan dengan baik dan optimal, karena adanya dua target yang menjadi landasan dalam pelaksanaan pemantauan pertumbuhan dan perkembangan balita.

### **C. Standarisasi Keterampilan dan Pengetahuan**

Standarisasi keterampilan dan pengetahuan pihak-pihak yang terlibat dalam pelaksanaan pertumbuhan dan perkembangan merupakan suatu standar kompetensi yang harus dimiliki oleh setiap pihak yang terlibat dalam melaksanakan tugasnya terkait keterampilan dan pengetahuan petugas. Hal tersebut di dukung oleh pendapat Pendapat Musafir dalam Fitri (2012) yang menyatakan bahwa kompetensi merupakan tingkatan pengetahuan, keterampilan dan tingkah laku individu dalam melaksanakan tanggungjawab atau tugasnya. Petugas yang memiliki kompetensi memungkinkan setiap jenis pekerjaan dapat

dilakukan dengan baik, tepat waktu, tepat sasaran, dan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan oleh organisasi itu sendiri.

Berdasarkan pendapat Robins dan Judge (2008) menjelaskan bahwa pengetahuan mencerminkan kemampuan kognitif seorang pegawai atau petugas berupa kemampuan untuk mengenal, memahami, menyadari dan menghayati suatu pekerjaan atau tugas. Salah satu indikator yang dapat mengukur pengetahuan petugas tentang tugas atau pekerjaannya yaitu pemahaman tentang cakupan pekerjaan atau tugas yang menjadi tanggungjawab individu itu sendiri.

Standarisasi kemampuan pekerja dapat dicapai melalui seleksi pada karyawan dan pelatihan. Hal ini dimaksudkan untuk menyetarakan tingkat variasi pekerja, karena variasi yang tinggi dapat menyulitkan koordinasi aktivitas pekerja. Pelatihan dan pengembangan adalah merupakan investasi organisasi yang penting dalam sumber daya manusia (SDM). Pelatihan melibatkan segenap sumber daya manusia untuk mendapatkan pengetahuan dan keterampilan pembelajaran sehingga mereka segera akan dapat menggunakannya dalam pekerjaan (Wibowo, 2013). Dengan metode *on the job training* merupakan metode yang paling banyak digunakan dalam melatih tenaga kerjanya. Para karyawan mempelajari pekerjaannya sambil mengerjakannya secara langsung. Kebanyakan perusahaan menggunakan orang dalam perusahaan yang melakukan pelatihan terhadap sumber daya manusianya, biasanya dilakukan oleh atasan langsung (Bangun, 2012:210).

Standarisasi pengetahuan yang dimaksud ialah pengetahuan pekerja mengenai fungsi-fungsi serta tugas pada jabatannya (*job description*), serta tentang aturan atau prosedur kerja yang berlaku dalam proses kerja yang akan dilakukan. Terlihat berdasarkan hasil penelitian bahwa keterampilan dan pengetahuan petugas belum terstandarisasi, hal ini dikarenakan belum adanya pelatihan mengenai pemantauan pertumbuhan dan perkembangan balita yang dilakukan oleh penanggung jawab program tumbuh kembang kepada bidan pelaksana dan kader guna menyetarakan perbedaan persepsi dan pemahaman petugas, padahal setiap individu yang terlibat dalam pelaksanaan harus memiliki keterampilan dan pengetahuan yang sama agar tidak menitikberatkan hanya kepada pihak-pihak yang menguasai saja.

Pada pelaksanaan pemantauan pertumbuhan dan perkembangan balita pihak-pihak yang terkait harus memiliki keterampilan serta pengetahuan dalam melakukan kegiatan pemantauan pertumbuhan dan perkembangan, yakni sebagai berikut :

1. Deteksi dini penyimpangan pertumbuhan, melalui pengukuran berat badan terhadap tinggi badan dan pengukuran lingkar kepala anak,
2. Deteksi dini penyimpangan perkembangan, melalui skrining/pemeriksaan perkembangan anak menggunakan kuesioner pra skrining perkembangan (KPSP).
3. Deteksi dini penyimpangan mental emosional melalui kuesioner masalah mental emosional (kmme) bagi anak umur 36 bulan sampai 72 bulan, ceklis autisme anak prasekolah (*checklist for autism in toddlers/chat*) bagi anak umur 18 bulan sampai 36 bulan, formulir deteksi dini gangguan pemusatan perhatian dan hiperaktivitas menggunakan abbreviated conner rating scale bagi anak umur 36 bulan ke atas.

Jika dilihat berdasarkan indikator dalam pelaksanaan pemantauan pertumbuhan dan pemantauan yang dijelaskan di paragraf sebelumnya menunjukkan bahwa petugas yang terlibat dalam kegiatan pemantauan pertumbuhan dan perkembangan balita harus memiliki keterampilan bagaimana mendeteksi penyimpangan pengukuran, mendeteksi penyimpangan perkembangan dan mendeteksi penyimpangan mental emosional sesuai dengan standar baku yang sudah ditetapkan.

Hal ini didukung oleh penelitian Budiyantri dan Damayanti (2015) yang menunjukkan bahwa secara keseluruhan petugas membutuhkan pelatihan pengelolaan rekam medis terutama dalam hal pengetahuan rekam medis secara umum. Pengetahuan inilah yang nantinya akan mendorong sikap dan ketrampilan kerja petugas rekam medis dapat menjadi lebih baik lagi. Hasil dari kebutuhan pelatihan ini nantinya dapat diteruskan sebagai perencanaan pelatihan petugas rekam medis Rumah Sakit Mata Undaan Surabaya.

Sehingga dapat disimpulkan bahwasanya keterampilan dan pengetahuan mengenai pemantauan pertumbuhan dan perkembangan balita belum terstandarisasi karena belum ada upaya penyetaraan perbedaan *skill* berupa

pelatihan melainkan hanya pertemuan dan penyegaran bagi kader dan bidan pelaksana, hal ini dapat dibuktikan berdasarkan hasil observasi bahwasanya tidak ditemukan pelatihan kader dilihat dari perencanaan program, selanjutnya tidak tersedianya materi pelatihan ketika ditanyakan pelatihan seperti apa yang didapatkan mengenai pemantauan pertumbuhan dan perkembangan balita. Hal ini didukung oleh penelitian Sambodo (2016) menyatakan bahwa pelatihan yang terdiri dari materi, metode dan instruktur sangat berpengaruh terhadap produktivitas kinerja pegawai.

### **6.2.3 Pengawasan**

Pengawasan adalah kegiatan yang mengukur apa yang telah direncanakan dengan apa yang telah dilaksanakan yang berguna untuk meminimalisir penyimpangan yang dapat menghambat proses pencapaian tujuan organisasi (Al-adluny,2010). Pendapat tersebut didukung oleh Defi (2013) yang menyatakan bahwa pemeriksaan atau pengontrolan secara langsung dan berkala dari pihak yang lebih atas kepada pihak yang ada dibawahnya, guna memudahkan dalam mengontrol seluruh kegiatan unit organisasi yang diperiksa dapat menjamin agar seluruh pekerjaan yang sedang dilaksanakan sesuai dengan rencana dan peraturan yang ada sehingga setelah dilakukannya kegiatan supervisi maka adanya *feedback* dari pihak yang terkait serta mampu memudahkan dalam mencapai target yang ditetapkan.

Pengawasan dalam pelaksanaan pemantauan pertumbuhan dan perkembangan balita merupakan salah satu mekanisme koordinasi dalam pelaksanaan kegiatan pemantauan. Berdasarkan hasil wawancara mendalam yang dilakukan oleh peneliti dengan informan menunjukkan bahwa telah dilakukannya supervisi oleh pihak penanggung jawab program tumbuh kembang Puskesmas yaitu system pengawasan yang dilakukan dalam pelaksanaan pemantauan pertumbuhan dan perkembangan bersifat pengawasan langsung ditinjau dari keikutsertaan penanggung jawab dalam melakukan pengawasan langsung kelapangan, akan tetapi kegiatan pengawasan tersebut bersifat regular (tidak rutin dan tidak terjadwal) karena pengawasan dilakukan berdasarkan kasus yang ada serta tidak ada form tertulis berupa *checklist* supervisi, sehingga pihak yang melakukan pengawasan tidak memberikan *feedback* mengenai kegiatan tersebut.

Sedangkan, dilihat dari aspek pengawasan tidak langsung bahwasanya belum dilaksanakan rapat monitoring dan evaluasi mengenai hasil pelaporan kegiatan guna pemantauan terhadap laporan hasil kerja pelaksanaan pemantauan pertumbuhan dan perkembangan balita di wilayah kerja Puskesmas Baloi Permai (Terry, 2010).

Menurut Mc. Farland seperti yang dikutip Handayaniingrat sebagai berikut: *“Control is the process by which an executive gets the performance of his subordinate to correspond as closely as possible to chosen plans, orders, objectives, or policies.* (Pengawasan adalah suatu proses dimana pimpinan ingin mengetahui apakah hasil pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh bawahannya sesuai dengan rencana, perintah, tujuan atau kebijaksanaan yang telah ditentukan). Dengan adanya pengawasan kemungkinan terjadinya melakukan penyimpangan dapat dicegah, sehingga usaha untuk mengadakan perbaikan atau koreksi dapat segera dilakukan.

Mengacu pada teori diatas, maka pengawasan tidak langsung apabila tidak dilaksanakan akan berdampak pada kebijakan / kualitas suatu program. Pengawasan tidak langsung berupa monitoring dan evaluasi belum pernah dilakukan oleh pihak Puskesmas Baloi Permai, hal ini akan berdampak pada pemantauan pertumbuhan dan perkembangan balita di wilayah kerja Puskesmas Baloi Permai, pelaksanaan pengawasan tidak langsung melalui monitoring dan evaluasi merupakan tahap awal sebagai masukan untuk menindaklanjuti hasil kegiatan yang lalu.

Berdasarkan penelitian Purwadi (2017) menyatakan bahwa seluruh komponen-komponen yang ada di dalam variabel pengawasan tidak langsung baik melalui laporan lisan dan laporan tulisan harus selalu diperhatikan pimpinan agar nantinya dapat menjadi masukan bagi pimpinan untuk mengetahui hasil pekerjaan bawahannya sehingga dapat dilaksanakan dengan baik, kemudian memberikan kemudahan dan memperlancar serta mempercepat tugas keseharian pegawai dan dapat mempengaruhi efektivitas kerjanya.

Winardi dalam Fitri (2012) menyatakan bahwa supervisi bertujuan untuk mengawasi aktivitas-aktivitas organisasi dalam mencapai suatu koordinasi sumber daya manusia seperti seluruh anggota kelompok atau petugas, dalam hal

pencapaian target atau tujuan organisasi secara efektif dan efisien. Hal tersebut sesuai dengan penelitian Nur, dkk (2013), yaitu pelaksanaan supervisi mempengaruhi motivasi kerja petugas yang turut mempengaruhi dalam menentukan kinerja petugas sehingga dapat menumbuhkan rasa tanggungjawab untuk melaksanakan upaya yang tinggi dalam mencapai tujuan dari keorganisasian.

Pendapat dan penelitian tersebut diperkuat oleh penelitian Mulyono (2012) yang menyatakan bahwa terdapat hubungan antara supervisi dengan kinerja perawat, yang mana pelaksanaan supervisi tersebut dilakukan oleh kepala ruangan yang dibantu perawat pelaksana di Rumah Sakit Tingkat III. Menurut Nainggolan dalam Fitri (2012) dalam pelaksanaan supervisi yang berjalan baik harus menggunakan teknik supervisi yang identik dengan teknik penyelesaian suatu masalah. Maka dari itu untuk melakukan supervisi yang baik harus memperhatikan beberapa hal, yaitu dimulai dari pengamatan langsung dan kerja sama. Ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam pengamatan langsung, yaitu adanya target yang jelas dalam melakukan pengawasan pengamatan langsung membutuhkan bantuan dengan suatu daftar isi yang telah disiapkan untuk di amati. Dimana daftar tersebut di siapkan guna terciptanya pengamatan secara lengkap dan apa adanya, serta dilakukannya pendekatan pengamatan secara langsung agar dapat menghindari berbagai prasangka negatif.

Menurut pendapat Fitri (2012) mengemukakan bahwa dalam pelaksanaan supervisi akan ada 2 (dua) pihak yang terlibat yakni pelaksana supervisi (supervisor) dan pihak yang di supervisi. Supervisi disini bermaksud untuk memberikan layanan yang bersifat profesional kepada pihak yang disupervisi. Sehingga mereka dapat melaksanakan tugas dan kegiatan yang menjadi tanggungjawab masing-masing yang harus mereka lakukan.

Berdasarkan uraian diatas, maka adapun manfaat pengawasan dalam pelaksanaan pemantauan pertumbuhan dan perkembangan balita adalah yaitu pengawasan berguna untuk meningkatkan efektivitas kinerja pihak-pihak yang terlibat di dalam kegiatan pengawasan. Kemampuan memberikan layanan itu akan diperoleh setelah para pengelola dan supervisor yang terlibat langsung kegiatan supervisi, selain itu supervisi bermanfaat untuk meningkatkan kemampuan para

petugas yang berperan aktif dalam kegiatan pemantauan pertumbuhan dan perkembangan balita seperti peningkatan efektifitas kerja yang erat hubungannya dengan peningkatan pengetahuan dan keterampilan petugas, dan peningkatan efisiensi kerja yang berhubungan dengan makin berkurangnya kesalahan yang dilakukan petugas dalam pelaksanaan pemantauan pertumbuhan dan perkembangan balita, serta hasil dari supervisi dapat bermanfaat untuk menyusun pedoman atau petunjuk pelaksanaan layanan profesional kepada petugas yang berperan aktif dalam kegiatan pertumbuhan dan perkembangan balita. Proses dalam memberikan layanan, format-format yang digunakan, catatan dan laporan supervisi, merupakan informasi yang berguna untuk menyusun acuan-acuan supervisi berdasarkan pengalaman lapangan.

Menurut penelitian Triwibowo (2013) pelaksanaan pengawasan berpengaruh signifikan terhadap motivasi kerja petugas keperawatan. Pengawasan yang dilakukan dengan baik akan membantu meningkatkan efektifitas kerja melalui motivasi yang dimiliki oleh petugas keperawatan itu sendiri yang akan berdampak positif dalam melaksanakan pekerjaannya agar dapat mengerahkan semua usahanya demi membantu mencapai tujuan dari organisasi. Sehingga semakin baik pelaksanaan supervisi terhadap petugas maka motivasi petugas menjadi meningkat yang dapat berdampak pada pencapaian tujuan organisasi yang meningkat pula.

Supervisi yang baik ialah dilakukan secara langsung dan tidak langsung, pada pelaksanaan pemantauan pertumbuhan dan perkembangan balita telah dilakukan pengawasan langsung yakni dengan turut serta dalam pelaksanaan pemantauan pertumbuhan dan perkembangan balita, akan tetapi tidak adanya form *checklist* sebagai salah satu indikator dalam pemantauan. Namun dalam pelaksanaannya pemantauan kinerja adalah membandingkan dan menilai apakah kinerja yang dilakukan telah sesuai dengan standar yang ditetapkan sebelumnya atau tidak. Maka dari itu perlunya monitoring dan evaluasi dalam pelaksanaan pengawasan untuk membandingkan hasil kegiatan terhadap kinerja yang sesuai dengan standar yang telah ditetapkan (Omran, 2011).

Menurut penelitian Budi (2012) yakni, hasil penelitian menunjukkan bahwa kendala pelaksanaan supervisi adalah belum adanya jadwal supervisi, jarang

dilakukannya pemecahan masalah yang ditemukan serta belum adanya umpan balik dari supervisor untuk perbaikan. Adanya kendala dalam pelaksanaan pengawasan sudah sepatutnya jika pengawasan yang akan dilakukan melalui perencanaan yang matang.

Dampak yang timbul apabila terdapat kendala dalam pelaksanaan pengawasan ialah mengakibatkan cakupan terhadap pemantauan pertumbuhan dan perkembangan balita rendah. Oleh karena itu, peningkatan pengawasan dalam pelaksanaan kegiatan pemantauan pertumbuhan dan perkembangan balita sangat perlu dilakukan secara berkala dan memiliki daftar yang terstandarisasi agar koordinasi dalam Puskesmas Baloi Permai dapat berjalan dengan baik, sehingga pemantauan pertumbuhan dan perkembangan balita dapat berjalan sesuai dengan target yang telah ditentukan.

#### **6.2.4 Komunikasi**

Ruesch dalam Daryanto (2014) mendefinisikan komunikasi sebagai suatu proses yang menghubungkan satu bagian dengan yang lain dalam kelompok atau organisasi guna menyampaikan pesan atau informasi yang akan di terima oleh sebagian atau bahkan seluruh anggota dalam kelompok atau organisasi tersebut. Selain itu definisi proses komunikasi menurut Suprpto (2009) adalah setiap langkah atau tahapan mulai saat menciptakan informasi atau pesan sampai dipahami oleh penerima informasi (komunikan), komunikasi yang berlangsung akan bersifat kontinu. Oleh sebab itu proses komunikasi umumnya mengikuti beberapa tahapan. Pengirim pesan (komunikator) mengirimkan informasi atau pesan melalui satu atau beberapa media komunikasi kepada penerima pesan (komunikan). Proses berlanjut apabila komunikan mengirimkan umpan balik (*feedback*) pada komunikator.

Berdasarkan pendapat Davis dan Newstorm dalam Siswandi (2011) menyatakan bahwa suatu komunikasi dalam organisasi atau instansi memiliki peranan yang sangat penting guna mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan. Karena organisasi atau instansi tidak akan mampu berdiri tanpa adanya komunikasi yang terjalin di dalamnya karena komunikasi merupakan bagian integral dari suatu organisasi. Apabila tidak terdapatnya proses komunikasi dalam organisasi, maka para petugas tidak dapat mengetahui apa yang telah dilakukan oleh rekan kerjanya, tidak hanya itu pimpinan tidak dapat menerima masukan atau

informasi dari petugas lainnya, sehingga pimpinan tidak dapat memberikan instruksi. Oleh karena itu koordinasi kerja tidak akan dapat dilakukan dalam organisasi atau instansi tersebut, sehingga akan menimbulkan permasalahan atau kendala pada organisasi jika tidak adanya jalinan komunikasi yang efektif dalam membangun organisasi itu sendiri.

Maka daripada itu, untuk mencapai tujuan dari kegiatan pemantauan pertumbuhan dan perkembangan balita memperhatikan mekanisme koordinasi, salah satunya adalah komunikasi. Sesuai dengan pendapat yang dikemukakan oleh Lubis (2013) komunikasi merupakan suatu sistem yang menghubungkan antar orang, antar bagian dalam organisasi atau bahkan sebagai aliran yang membangkitkan kinerja orang-orang yang terlibat dalam organisasi. Efektivitas organisasi atau instansi terletak pada efektivitas komunikasi berupa pesan yang disampaikan apakah sudah sesuai dengan kegiatan atau tugas setiap anggota organisasi, sebab komunikasi itu sangat berperan penting untuk menghasilkan pemahaman yang sama antara pengirim informasi dengan sipenerima informasi pada semua tingkatan atau level dalam organisasi. Sehingga dengan adanya komunikasi sangat mempengaruhi kegiatan manajerial dapat dilakukan (Fitri, 2012).

Menurut Pace dan Faules (2006) dalam bukunya yang berjudul “Komunikasi Organisasi” berpendapat bahwa peran komunikasi tersebut dapat dilihat dalam 2 (dua) cara pelaksanaan aliran komunikasi yang digunakan yaitu aliran komunikasi formal yang terdiri atas komunikasi ke bawah dan komunikasi ke atas. Dimana komunikasi ke bawah mengalir dari pimpinan kepada anggota organisasi yang bertujuan untuk memberikan penjelasan mengenai apa saja yang harus dikerjakan oleh para anggota sesuai dengan tanggungjawab masing-masing. Informasi yang disampaikan lebih berisikan tentang pengarahan, petunjuk, perintah, serta teguran yang diberikan secara berkala dan terus-menerus dari atasan ke bawahan dengan menggunakan media secara langsung atau intruksi, pertemuan, dan alat bantu komunikasi melalui telpon sedangkan tulisan seperti buku-buku pedoman petunjuk teknis, memo, laporan dan sebagainya. Sedangkan komunikasi ke atas mengalir dari anggota organisasi ke pimpinan yang mana informasi yang disampaikan terkait jika adanya permasalahan kerja yang belum dipecahkan di

tingkat manajemen bawah sehingga membutuhkannya bantuan dari pimpinan. Selain itu ada komunikasi horizontal atau mendatar dimana komunikasi mengalir antara individu atau kelompok dalam lingkup kerja yang sama tingkatannya, yang bertujuan untuk mempermudah koordinasi dalam pekerjaan karena didapatkan pemahaman yang sama antar kelompok kerja. Aliran komunikasi yang lain yaitu komunikasi informal dimana muncul dari interaksi diantara individu dimana informasi yang ada tampak mengalir dengan arah yang tidak dapat di duga. Karena komunikasi ini bersifat pribadi tanpa adanya agenda khusus. Lasape dalam Fitri (2012) menekankan ada tiga fungsi dari suatu informasi yaitu hasil output yang mengacu pada pengarahan dan koordinasi, pengendalian terhadap aktivitas organisasi serta mampu membangkitkan inovasi atau mendorong perubahan dalam organisasi itu sendiri.

Terlihat berdasarkan hasil penelitian guna menciptakan proses komunikasi yang baik maka komunikasi yang terjalin harus tepat sasaran dan membutuhkan bantuan media dalam penyampaiannya, sehingga berdasarkan hasil wawancara mendalam dengan informan menunjukkan bahwa sudah adanya komunikasi yang terjalin antara setiap petugas yang terlibat dalam pelaksanaan pemantauan pertumbuhan dan perkembangan balita di wilayah kerja Puskesmas Baloi Permai yaitu komunikasi yang dilakukan antara penanggung jawab program tumbuh kembang dengan bidan pelaksana ialah berupa komunikasi formal melalui pertemuan atau rapat lokakarya mini Puskesmas, akan tetapi komunikasi tersebut tidak rutin dan tidak terjadwal karena dilaksanakan berdasarkan ketersediaan waktu kepala Puskesmas bukan berdasarkan jadwal yang telah ditentukan dan komunikasi antara bidan pelaksana dengan kader posyandu komunikasi non formal yakni melalui media komunikasi seperti telpon dan grup *whatsapp* Puskesmas mengenai persiapan kegiatan posyandu.

Kegiatan pelaksanaan pemantauan pertumbuhan dan perkembangan balita tentu tidak terlepas dari tanggungjawab seseorang yang berperan dan sangat berpengaruh dalam kegiatan tersebut yakni penanggung jawab program tumbuh kembang. Sebagai koordinator harus mampu melaksanakan fungsi komunikasi untuk mengkoordinasikan petugas yang terlibat dan berperan aktif dalam pemantauan pertumbuhan dan perkembangan balita secara langsung, mengontrol

setiap kerja para petugas dan selalu menjaga keharmonisan hubungan antar tingkatan unit kerja sehingga mampu menciptakan kondisi kerja yang kondusif dan tercapainya tujuan dari pemantuan pertumbuhan dan perkembangan balita.

Sesuai dengan pendapat Pace dan Faules (2006) komunikasi yang mengalir dari atas ke bawah memiliki 5 (lima) tujuan pokok, yakni memberikan pengarahan atau instruksi kerja tertentu, memberikan informasi mengapa suatu pekerjaan itu harus dilaksanakan, memberikan informasi mengenai praktik dan prosedur pelaksanaan kerja dalam organisasi, memberikan umpan balik pelaksanaan kerja kepada para petugas mengenai hasil kerja yang dihasilkan oleh setiap petugas, menyajikan informasi mengenai aspek ideologi dalam membantu organisasi menanamkan pengertian tentang tujuan atau target yang ingin dicapai. Pace dan Faules (2006) jika suatu komunikasi dilakukan secara efektif akan memberikan dampak terhadap organisasi, seperti komunikasi akan meningkatkan motivasi petugas, komunikasi menjadi sumber bagi seluruh anggota organisasi dalam proses pembuatan keputusan, komunikasi dapat mempengaruhi sikap individual cenderung menjadi baik jika individual tersebut mendapat informasi, dan sebaliknya, komunikasi dapat memberikan kontrol atau pengendalian pada setiap petugas dalam berbagai cara. Oleh sebab itu, komunikasi sangat membantu dalam mengendalikan fungsi manajemen

. Berdasarkan penelitian Saputra dalam Fitri (2012) dampak dari suatu komunikasi yang terjalin tidak efektif antara pimpinan dengan bawahan atau sebaliknya dalam suatu organisasi adalah tidak terciptanya keharmonisan kerja, serta kesatuan tindakan koordinasi. Sehingga dapat mempengaruhi pelaksanaan koordinasi yang tidak baik dan dapat menghambat proses pencapaian tujuan atau target dari organisasi tersebut.

Oleh sebab itu, peningkatan komunikasi dalam pelaksanaan pemantuan pertumbuhan dan perkembangan balita sangat perlu dilakukan agar koordinasi dapat berjalan dengan efektif sehingga dapat menghasilkan output dari pelaksanaan pemantuan pertumbuhan dan perkembangan balita yang ingin di capai.

